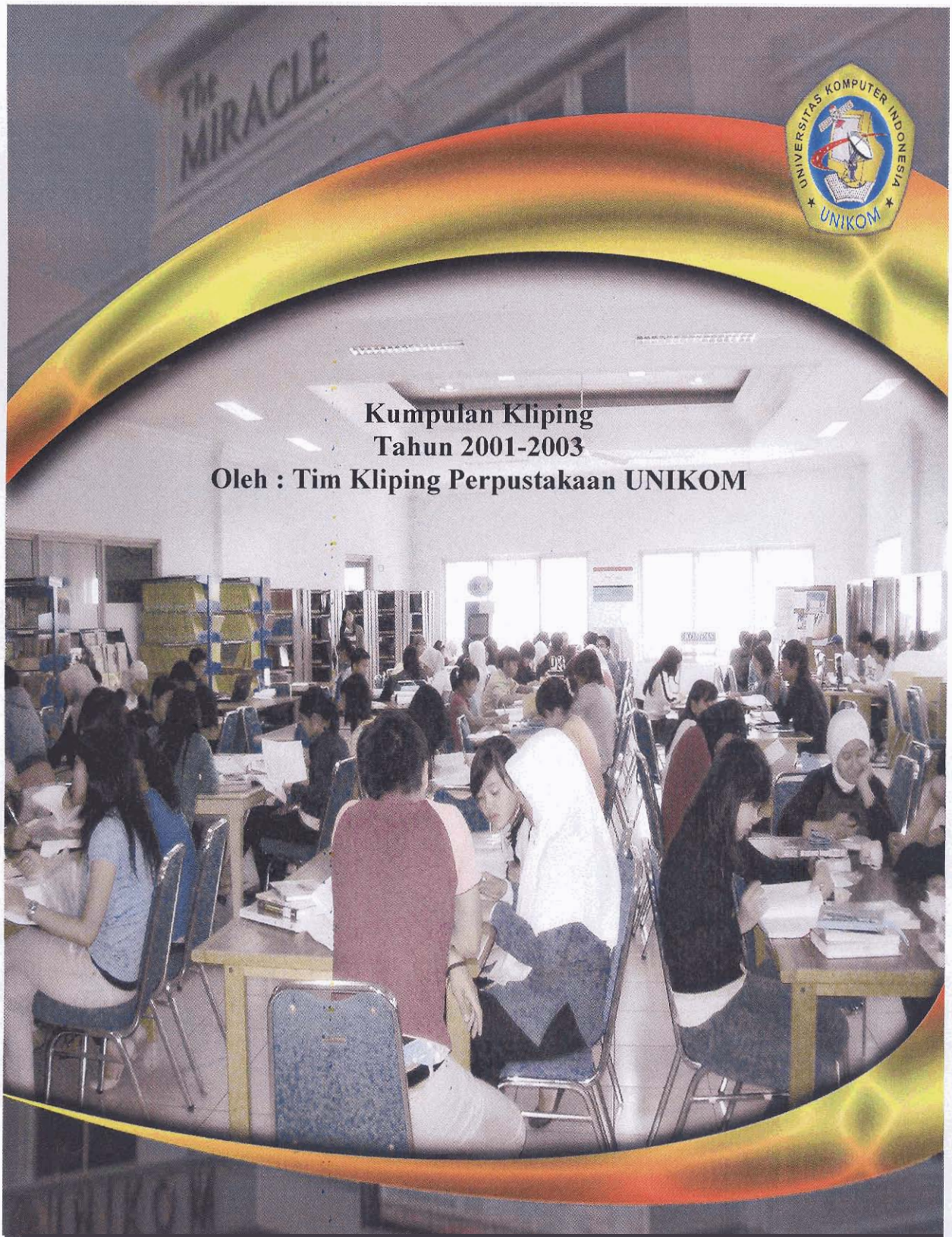


Kumpulan Kliping
Tahun 2001-2003
Oleh : Tim Kliping Perpustakaan UNIKOM

perpustakaan unikom

learning and get friendly with library

gedung 5 lantai 7
e-mail : perpus@unikom.ac.id

Hari /Tanggal /Bulan/ Tahun : RABU / 19 / JUNI / 2002
Hlm/Kolom : 15 / 1-5
Sumber : Kompas / ~~Pikiran Rakyat~~ /
Penulis : SYAMSUDDIN, Amir
Subjek : ASURANSI / 368

MASALAH PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia (AJMI) pascaputusan pailit perusahaan itu tampak semakin ramai. Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional (IMF), termasuk Pemerintah Kanada, juga tidak ketinggalan telah menyatakan keprihatinan. Tidak kurang dari Wakil Presiden Hamzah Haz terpaksa harus memanggil Menteri Keuangan (Menkeu) Boediono untuk meminta penjelasan tentang duduk perkara kasus tersebut.



Amir Syamsuddin

PEMERINTAH memang harus ikut bertanggung jawab, karena telah memberikan komitmen untuk menjamin terciptanya penegakan hukum yang *fair*, adil, dan proporsional terhadap sengketa-sengketa hukum yang melibatkan investor asing. Dan manakala putusan-putusan Pengadilan Niaga di Indonesia masih kontroversial dan diduga beraroma KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme), bagaimana dengan jaminan yang telah diberikan oleh pemerintah tersebut?

Sementara itu, perang iklan antara kurator yang ditunjuk pengadilan dengan pihak kuasa hukum AJMI semakin menambah kekisruhan masalah. Banyak pihak menyayangkan mengapa masalah ini berlarut-larut. Ini merupakan cermin lemahnya sistem peradilan, khususnya yang berkaitan dengan Pengadilan Niaga.

Pengadilan yang diharapkan menjadi tumpuan para pencari keadilan di bidang bisnis dan niaga, justru menjadi ajang kontroversi yang lebih parah dibanding pengadilan negeri.

◆◆◆

KASUS Manulife bermula dari pengajuan permohonan pailit oleh kurator PT Dharmala Sakti Sejahtera Tbk (DSS) Paul Sukron, dengan alasan AJMI memiliki kewajiban (utang) untuk membayar dividen tahun buku 1999 berikut bunganya kepada DSS, mengingat pada tahun buku 1999 DSS berkedudukan sebagai pemegang 40 persen saham AJMI.

Menurut pihak AJMI, mereka belum memiliki kewajiban membayar dividen tahun 1999, karena dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) AJMI sudah dinyatakan bahwa dividen tahun 1999 belum dapat dibagikan sampai syarat RBC (*Risk Based Capital*—**Red**) yang disyaratkan Menteri Keuangan tercapai.

Dalam putusan yang dibacakan di Pengadilan Niaga Jakarta, Majelis Pengadilan Niaga yang diketuai Hasan Basri menyatakan, AJMI terbukti memiliki utang yang jatuh tempo dan dapat ditagih yang berasal dari dividen tahun 1999 yang belum dibayar ke PT DSS.

Dalam pertimbangan hukumnya, majelis berpendapat bahwa dividen tersebut menjadi utang AJMI terhadap DSS dan berdasarkan Pasal 46 Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT), pemegang saham suatu perseroan berhak atas dividen.

Mengenai keberadaan kreditor lain yang menjadi salah satu syarat untuk menyatakan debitor pailit, majelis menyatakan bahwa utang pajak ke Kantor Pelayanan Pajak Menteng sebagai utang AJMI ke kreditor lain. Dengan pertimbangan tersebut maka majelis hakim menyatakan AJMI pailit, walaupun ada perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) di antara para hakim.

Kasus ini memicu kemarahan berbagai pihak. Tidak saja para pemegang polis, tetapi juga para pemegang saham AJMI, para pemerhati hukum, dan kalangan bisnis lainnya.

◆◆◆

AKHIR-AKHIR ini Pengadilan Niaga disibukkan dengan permohonan pailit terhadap perusahaan-perusahaan yang sifatnya mengelola dana dari masyarakat yang diajukan mereka yang tidak berhak. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Kepailitan (UUK), permohonan pailit terhadap perusahaan tersebut hanya dapat diajukan pihak tertentu yang memiliki *persona standi in judicio*.

Walaupun demikian, pihak Pengadilan Niaga dengan serta merta menerima pengajuan tersebut tanpa melakukan selektif terlebih dahulu. PT Bank Danamon misalnya, dimohonkan pailit oleh Bank IFI akibat adanya utang senilai lima juta dollar AS yang berasal dari pengalihan Bank Nusa Nasional ke Bank Danamon.

Padahal diketahui bahwa berdasarkan Pasal 1 Ayat (3) UUK, bila debitor merupakan bank, maka permohonan pailit hanya dapat diajukan Bank Indonesia (BI).

Selanjutnya, PT Harita Kencana Sekuritas sebuah perusahaan sekuritas juga dimohonkan pailit oleh kreditornya, padahal menurut Pasal 1 Ayat (4) UUK yang dapat mengajukan permohonan pailit terhadap perusahaan efek hanyalah Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam).

Bagi bank dan perusahaan sekuritas masih untung karena *memiliki lembaga tertentu* yang merupakan *persona standi in judicio*. Bagaimana dengan perusahaan asuransi? Dalam kurun waktu antara bulan Mei-Agustus 2001, tiga perusahaan asuransi dimohonkan pailit. Tercatat, PT Asuransi Namura Tata Life, PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia dan PT Asuransi Bumijaya Tanjung dihadapkan pada ancaman kepailitan. Ketiganya dimohonkan pailit atas dasar klaim asuransi yang belum dan atau tidak dibayar. Dari ketiga perusahaan asuransi tersebut, PT Asuransi Namura Tata Life akhirnya dinyatakan pailit. Permasalahan yang muncul adalah perusahaan asuransi sebagai sebuah perusahaan kepercayaan sebagaimana bank selama ini, tidak memiliki sebuah badan yang membawahinya laiknya BI atau Bapepam. Dengan demikian begitu mudah mereka dimohonkan pailit oleh pihak-pihak tertentu. Pemerintah seharusnya dapat memberikan kepastian hukum kepada nasabah perusahaan asuransi.

Selama ini, dalam memailitkan perusahaan asuransi pemerintah hanya berpatokan pada UUK dan UU No 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), sehingga muncul permasalahan, siapa yang berwewenang memailitkan perusahaan asuransi, bagaimana pembagian aset-asetnya, siapa yang akan mendapat prioritas dari pembagian itu, pemegang polis atau kreditor.

Semua ini akan dihadapi oleh perusahaan asuransi selama belum ada UU Asuransi sebagaimana halnya UU Perbankan. Sementara itu, putusan pengadilan niaga selama ini terkesan kurang memberikan rasa keadilan kepada para pelaku bisnis. Banyak pertimbangan hukum majelis hakim yang mencerminkan ketidakpahaman para hakim terhadap UUK.

Misalnya, PT Gemawidya Statindo Komputer (GSK) yang beberapa waktu sebelum dimohonkan pailit ditunjuk sebagai pemenang tender proyek *remote trading* BEJ, harus menghadapi kenyataan pahit. Pengadilan Niaga memutuskan untuk menyatakan GSK pailit karena terbukti berutang kepada PT Nikko Securities Indonesia.

Otomatis kedudukan GSK sebagai pemenang tender akhirnya dibatalkan lantaran pernyataan pailit tersebut. Belakangan, GSK mengajukan gugatan perdata terhadap Nikko Securities di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan GSK dinyatakan sebagai pemenang. Dengan demikian bagaimana dengan keputusan pailit di atas?

Kini, PT AJMI, perusahaan asuransi jiwa terbesar keempat di Indonesia yang memiliki lebih dari 500.000 nasabah dan total aset dikelola mencapai lebih dari Rp 3,1 trilyun, tanggal 13 Juni 2002 dinyatakan pailit di Pengadilan Niaga Jakarta oleh Kurator dari perusahaan DSS yang masih bermasalah.

Sementara, putusan majelis hakim Pengadilan Niaga Jakarta tersebut tidak memiliki dasar hukum yang kuat. Inilah yang kemudian memunculkan kontroversi dan dugaan negatif.

Kurang baiknya kinerja Pengadilan Niaga, sudah sejak lama dicemaskan berbagai pihak. Dengan kasus AJMI ini, kekhawatiran banyak orang tersebut menjadi kenyataan bahwa kinerja pengadilan niaga kita lebih buruk ketimbang pengadilan biasa. Apabila keadaan ini dibiarkan berlanjut, dampaknya sangat besar kepada kepercayaan masyarakat terhadap dunia perbankan, asuransi, dan pasar modal.

Kalau sudah demikian suka atau tidak suka, keberadaan pengadilan ini mesti dipertanyakan kembali, jika perlu dibubarkan saja, karena menimbulkan pikiran baru tentang dugaan adanya mafia peradilan.

AMIR SYAMSUDDIN
SH MH
Praktisi hukum dan Chairman of Center for Law and Justice Studies.

Hari /Tanggal /Bulan/ Tahun : RABU / 19 / JUNI / 2002
Hlm/Kolom : 10 / 1-4
Sumber : Kompas / ~~Pikiran Rakyat~~ /
Penulis :
Subjek : PERDAGANGAN WANITA / 364.1

POLA PERDAGANGAN PEREMPUAN DAN ANAK DI ASIA TENGGARA

Myanmar

- Anak laki-laki dan perempuan dikirim ke luar lewat Thailand untuk berbagai tujuan.
- Menjadi tempat transit anak perempuan dari Cina ke Thailand untuk pelacuran.

Data:

Pemerintah Thailand memperkirakan, 20.000 perempuan dan anak perempuan telah dikirim dari Myanmar ke berbagai tempat pelacuran di Thailand dengan rata-rata 10 000 orang dikirim setiap tahunnya.

Kamboja

Perdagangan domistik: anak-anak perempuan untuk pelacuran. Dikirim ke Thailand dan Vietnam: anak perempuan dan laki-laki untuk berbagai keperluan. Datang dari Vietnam: anak perempuan untuk pelacuran

Data:

- Lebih dari 15% dari 3.000 perempuan yang dikirim dari Vietnam selatan berusia kurang dari 15 tahun.
- ESCAP dan ILO mengindikasikan adanya ribuan gadis Khmer yang dikirim ke Thailand untuk pelacuran dan ratusan anak-anak untuk mengemis.

Indonesia

Perempuan dikirim keluar Indonesia, terutama untuk prostitusi dan pekerja rumah tangga.

- Diperkirakan 40 perempuan dikirim ke Taiwan dan Hongkong setiap bulan.

Thailand

Perempuan dan anak-anak datang dari kawasan yang dilalui Sungai Mekong (Myanmar, Laos, Vietnam, Kamboja) untuk pelacuran dan buruh anak.

- Dari Thailand sendiri, mereka yang diperdagangkan untuk pelacuran berasal dari kawasan utara.
- Tempat transit perdagangan-kebanyakan perempuan- dari Cina dan negara-negara lainnya ke Malaysia dan Singapura.
- Mengirim ke Jepang, Singapura, dan negara lainnya.

Data:

- 80.000 perempuan dan anak-anak dikirim untuk pelacuran ke Thailand sejak 1990. Jumlah terbesar berasal dari Myanmar, diikuti Yunnan (Cina) dan Laos. Perdagangan internal biasanya berlangsung pada gadis-gadis Thai ang berusia 12-16 tahun yang berasal dari kawasan pegunungan di utara dan timur laut Thailand.

Laos

Tempat transit anak perempuan dari Cina dan Vietnam ke Thailand untuk pelacuran. Dikirim ke Thailand: anak perempuan dan laki-laki untuk pelacuran, pekerja rumah tangga, pabrik, dan konstruksi.

Mayoritas kasus melibatkan perempuan berumur 15-19 tahun. Yang paling rentan adalah suku-suku minoristas.



Filipina

Perdagangan domistik: anak-anak untuk pelacuran.

Dikirim ke berbagai negara: untuk pelacuran dan pekerja rumah tangga.

Data:

- Selama 1996, 492 dari 3.776 kasus yang dilaporkan adalah penyalahgunaan anak untuk diperdagangkan dan pelacuran.
- 150.000 perempuan Filipina dilaporkan dikirim ke Jepang selama 1998 untuk pelacuran.

Vietnam

Perdagangan domistik untuk pelacuran. Ke Kamboja dan Cina untuk pelacuran, pekerja rumah tangga, dan pengantin.

- Datang dari Kamboja: anak-anak pengemis

Data:

- 30.000 perempuan Vietnam dan anak-anak dikirim ke Cina untuk pekerjaan rumah tangga dan ke Kamboja untuk pelacuran.
- Antara 1991 sampai Juni 1999, 1.739 kasus perdaganganm, perempuan dan anak-anak diadili, termasuk 253 kasus perdagangan.

Sumber: UNICEF

Hari /Tanggal /Bulan/ Tahun : Rabu / 19 / Juni / 2002
Hlm/Kolom : 15 / 6-7
Sumber : Kompas / Pikiran Rakyat /
Penulis :
Subjek : ASURANSI / 368

Kasus AJMI, Bom Waktu bagi Industri Asuransi

KASUS pailit PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia (AJMI) kini mencuat. Sampai-sampai para petinggi negara, termasuk pihak Departemen Luar Negeri Kanada di Ottawa dan Wakil Presiden Hamzah Haz turun tangan. Persoalan mendasar, mengapa Hakim Pengadilan Niaga Jakarta memailitkan AJMI atas gugatan pihak kurator PT Dharmala Sakti Sejahtera (PT DSS)?

Parahkah kondisi keuangan PT AJMI, sehingga dinilai tidak dapat membayar utang dan dinyatakan pailit? Apakah hakim Pengadilan Niaga dapat memutuskan pailit terhadap perusahaan asuransi? Dilihat dari bisnis industri asuransi, kasus AJMI dapat menjadi preseden buruk bagi iklim investasi.

Begitu perusahaan asuransi dinyatakan pailit, nasib ribuan pemegang polis dipertaruhkan, mirip dengan industri perbankan. Perusahaan asuransi lain pun dicekam rasa cemas dan khawatir karena berpotensi tertimpa nasib yang sama. Investor asing yang mau berinvestasi pun meragukan kepastian hukum di Indonesia.

◆◆◆

GUGATAN PT DSS didasarkan atas klaim dividen sebesar Rp 22,3 milyar untuk 40 persen saham PT AJMI yang dikuasai DSS tahun 1999. PT DSS berpendapat PT AJMI ingkar janji membayar dividen itu, termasuk bunga atas utang dividen sejak Januari 2000 sampai April 2002 sebesar Rp 10,4 milyar.

Atas gugatan itu, hakim Pengadilan Niaga Jakarta yang diketuai Hasan Basri menyatakan PT AJMI pailit. Salah satu pertimbangan hakim adalah bahwa akta perjanjian usaha patungan antara PT AJMI dan PT DSS tanggal 10 Juni 1998 sah, sehingga PT AJMI masih memiliki kewajiban membayar dividen kepada PT DSS.

Dalam akta itu disebutkan PT AJMI wajib membayar dividen sedikitnya 30 persen dari jumlah surplus yang melebihi Rp 100 juta. Berdasarkan laporan akhir tahun buku yang berakhir 31 Desember 1999, PT AJMI mencatat surplus sebesar Rp 186 milyar.

Mengapa PT AJMI tidak membayar dividen kepada PT DSS? Menurut Assistant Vice President Agency PT AJMI Nelly Husnayati, dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT AJMI tahun 2000, memang sudah disetujui dan diputuskan oleh pemegang saham bahwa dividen tidak dibagikan.

Pembagian dividen tidak dilakukan karena tingkat kecukupan modal (*risk based capital*/RBC) PT AJMI belum mencukupi untuk pembagian dividen. "Kalau sudah diputuskan tidak dibagikan, bagaimana kita harus membagikan. Kalau dikatakan tidak membayar utang, utang yang mana," tanya Nelly.

Oleh karena itu, gugatan itu sama sekali tidak mendasar. Selain PT DSS, tambahnya, International Finance Corporation (IFC), anak perusahaan Bank Dunia, juga memiliki saham PT AJMI sebesar sembilan persen dan Manulife Financial dari Kanada memiliki saham sebesar 51 persen.

Dilihat dari laporan keuangan PT AJMI, Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan Departemen Keuangan (Depkeu) sebagai pembina dan pengawas industri asuransi, menilai PT AJMI sehat dan dapat membayar kewajiban (*solvent*). Laporan itu pun diumumkan secara luas di media massa.

Dari laporan PT AJMI per 31 Maret 2002, kekayaan yang diperkenankan mencapai Rp 1,812 milyar, kewajiban Rp 1,596 milyar, tingkat solvabilitas Rp 216 milyar, batas tingkat solvabilitas minimum Rp 129 milyar, kelebihan batas tingkat solvabilitas Rp 87 milyar, dan rasio RBC sebesar 167,26 persen.

Dalam Surat Keputusan (SK) Menteri Keuangan No 481/KMK.017/1999, sejak akhir tahun 2001, batas tingkat solvabilitas sekurang-kurangnya 40 persen dari batas tingkat solvabilitas minimum. Sejak akhir tahun 2002, batas tingkat solvabilitas sekurang-kurangnya 75 persen dari batas tingkat solvabilitas minimun. Itu berarti, rasio RBC PT AJMI sebesar 167,26 persen masih mencukupi atau memenuhi persyaratan.

◆◆◆

JIKA kondisi keuangan PT AJMI masih solid, putusan pailit memang dapat menjadi kontroversial. Apalagi jika dilihat dari sisi hukum. Undang-Undang (UU) No 1/1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang tentang Kepailitan sekarang ini tidak jelas mengatur apakah majelis hakim dapat memailitkan perusahaan asuransi.

Perusahaan asuransi, sebagai lembaga keuangan, mirip industri perbankan. Artinya, perusahaan asuransi menyangkut kepentingan banyak nasabah atau pemegang polis. Kalau di sektor perbankan, hanya Bank Indonesia (BI) yang dapat menyatakan pailit suatu bank. Pertanyaannya, apakah pailit terhadap perusahaan asuransi dapat dilakukan oleh Pengadilan Niaga?

Perusahaan asuransi tunduk dengan UU No 2/1992 tentang Usaha Perasuransian. Dalam pasal 17 UU No 2/1992 disebutkan dalam hal terdapat pelanggaran terhadap ketentuan dalam UU ini atau peraturan pelaksanannya, Menteri Keuangan dapat melakukan tindakan berupa pemberian peringatan, pembatasan kegiatan usaha, atau pencabutan izin usaha.

Ketua Umum Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) Angger P Yuwono mengungkapkan, dengan landasan UU No 2/1992 itu, pengadilan tidak dapat serta merta memutuskan pailit terhadap perusahaan asuransi. Perusahaan asuransi mempunyai karakteristik yang berbeda dengan perusahaan lain, seperti di bidang manufaktur.

Perbedaan ini mendasar, sebab perusahaan asuransi menyangkut kepentingan banyak nasabah atau pemegang polis, tunduk pada UU No 2/1992 dan berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan, Depkeu. "Oleh karena itu, hakim yang memeriksa seharusnya meminta masukan dari Menteri Keuangan sebagai pembina dan pengawas perusahaan asuransi," katanya.

Angger menambahkan, dalam UU No 1/1998 juga tidak sebutkan dengan tegas ketentuan mengenai pailit terhadap perusahaan asuransi. Hal itu dapat menimbulkan ketidakpastian hukum bagi industri asuransi dalam menyelesaikan sengketa utang piutang.

Letak ketidakpastiannya jelas terletak pada bagaimana penyelesaian sengketa antara nasabah dengan perusahaan asuransi atau perusahaan asuransi dengan mitra usaha seperti yang terjadi pada kasus gugatan PT DSS terhadap PT AJMI. Apakah majelis hakim dapat menjatuhkan vonis pailit terhadap perusahaan asuransi atas gugatan seorang atau pihak tertentu?

◆◆◆

JIKA perusahaan asuransi sebesar PT AJMI dengan kondisi keuangan yang *solvent* dapat dipailitkan, hal itu pun bisa menjadi ancaman dan bom waktu bagi perusahaan asuransi lainnya. Artinya, perusahaan asuransi lain berpotensi digugat pailit oleh nasabah atau pihak lain.

Tidak hanya itu, ribuan nasabah atau pemegang polis asuransi yang sudah menaruh kepercayaan kepada pihak asuransi dihadapkan pada ketidakpastian berkaitan dengan uang yang telah ditanam, meskipun pihak AJMI menyatakan tetap menjamin.

Tidak seperti lembaga perbankan, baik swasta maupun pemerintah, pemerintah tidak mau menjamin uang nasabah di perusahaan asuransi.

Dari data AAJI dengan anggota mencapai 62 perusahaan asuransi jiwa, total pemegang polis mencapai 26.244.210 nasabah per kwartal pertama tahun 2001. Per kwartal pertama tahun 2001, total aset mencapai Rp 22,3 trilyun, dan total investasi perusahaan asuransi sebesar Rp 17 trilyun.

Jenis investasi perusahaan asuransi antara lain deposito berjangka (41 persen), efek-efek/sekuritas (29,7 persen), Sertifikat Bank Indonesia/SBI (6,4 persen), dan penyertaan langsung (7,91 persen).

Menurut Angger, kasus Manulife juga menjadi preseden yang negatif bagi investor asing yang enggan berinvestasi di bidang industri asuransi. (FER)



Hari /Tanggal /Bulan/ Tahun : SABTU / 23 / JUNI / 2002
Hlm/Kolom : 4 / 3-6
Sumber : Kompas / Pikiran Rakyat /
Penulis : NADESUL, HENDRAWAN
Subjek : KESEHATAN / PSIKOLOGI / 362.2

Ada Apa dengan Sakit?

ADA yang bertanya, mana lebih sukar, berpura-pura sehat atau berpura-pura sakit? Jawabannya tergantung siapa yang akan menjawabnya. Buat dokter, tak mudah memastikan siapa berpura-pura sakit, sedangkan bagi pasien berpura-pura sakit lebih mudah daripada berpura-pura sehat. Sebuah data menyebutkan, dari pemeriksaan seribu orang yang kelihatannya sehat, 37 di antaranya ternyata sakit.

Rata-rata orang yang gila kerja tidak merasa sakit kendati sedang sakit. Sebaliknya, orang *hypochondriac* selalu merasa sakit kendati sehat. Baron von Munhausen tercatat mahir melakukan peran secara meyakinkan sehingga dokter bedahnya berhasil dikelabui. Pasien begini merasa puas setiap kali dokternya kecele tidak menemukan penyakitnya.

Dalam keseharian pun kita melihat tidak semua yang datang ke dokter pasti sedang sakit. Wanita yang masuk kamar praktik dokter dengan dandanan menor, misalnya, hampir pasti tidak sedang sakit. Setidaknya tak ada yang tidak beres dengan badannya. Boleh jadi cuma lagi rindu pada dokternya.

Mangkir untuk urusan mengantar nenek pulang kampung, atau mertua kawin lagi, boleh jadi orang yang sebetulnya sehat minta dokter memberi label sakit. Besarnya otoritas dokter melabel sehat atau sakit, menjadi ruang bagi orang yang sebetulnya bukan pasien, dan tentu buat dokternya juga, bisa leluasa bersandiwara. Sebab suka tidak suka, setuju atau tidak percaya, sertifikat dokter legal di penglihatan hukum. Termasuk sertifikat yang dokter berikan kepada orang yang berpura-pura sakit.

Taruhlah dokternya jujur. Orang sakit mengeluh ada rasa tidak enak di badan. Tetapi, keluhan tidak enak subyektif milik pasien. Andai keluhan cuma dusta pun, dokter bisa apa. Sahih tidaknya keluhan sakit yang mengaku pasien belum tentu bisa dokter buktikan. Apalagi jika dokter tidak jujur.

Menjadi pelik jika orang yang mengaku pasien, misalnya, menolak diajak bicara dokternya, tidak mau bangkit dari kursi roda, mengaku tak mampu menjawab tes yang dokter berikan, atau pengakuan dusta lainnya. Kondisi orang yang sebetulnya bukan pasien seperti itu berisiko menyesatkan dokter dalam menetapkan status medis. Itu sebab keluhan sakit yang dipercaya dokter bisa dijadikan tempat berlindung dan ruang sandiwara bagi pihak yang sebetulnya bukan pasien untuk berpura-pura sakit.

◆◆◆

KINI makin banyak orang yang perlu mengatakan lain dari yang dirasakan tubuhnya untuk kebutuhan yang lebih besar. Bila label sakit melindungi orang dari perkara hidup dan mati, atau menjadikan orang terbebas dari hukuman, berpura-pura sakit dijadikan jurus paling jitu.

Buat dokter tidak sahih sakitnya seseorang hanya dari keluhan yang didengar. Untuk sampai pada diagnosis, dokter harus memeriksa, memakai tes, dengan alat-alat bantu, dan tentu hati nuraninya juga. Bahwa keluhan pasien betul sebuah penyakit, dan bukan kebohongan yang tidak bisa masuk akal medis.

Untuk menetapkan seseorang sehat atau sakit ada kaidah medisnya. Dokter tidak harus percaya pada tiap keluhan pasien. Untuk membenarkan keluhan pasien yang subyektif itu dokter perlu cerdik melakukan pengecekan silang. Jika macam-macam cara dan alat belum juga memadai menentukan sakitnya seseorang, dokter dilarang keras mengarang apalagi mereka-reka.

Selain dari keluhan pasien yang subyektif, dalam mendiagnosis dokter melihat, melacak, dan menemukan gejala dan tanda penyakit. Gejala dan tanda penyakit selalu obyektif. Orang

tak mungkin berdusta sehat jika gejala dan tanda penyakit sudah muncul. Bila ada cacar herpes di kelamin, pasien tak mungkin menyangkal pernah berselingkuh.

Jika tanda dan gejala penyakitnya nihil, mungkin memang tidak sakit. Namun, jika orang yang diperiksa mahir bersandiwara, dokter berisiko terkecoh menetapkan status medisnya. Bagi orang yang niatnya perlu mengatakan lain dari yang dirasakan tubuhnya, ruang buat mengelabui dokter selalu saja ada, dan lebar.

Penyakit fisik bisa lebih tepat dideteksi, diperiksa, dan dibuktikan mengikuti kaidah medis. Namun, tidak selalu bisa persis utuh menyimpulkan warasnya gambaran jiwa, kemampuan intelek, suasana emosi, dengan bantuan tes paling canggih sekalipun. Hasil tes harus diragukan jika orang yang diperiksa tidak kooperatif.

Bisa apa dokter bila orang yang diperiksanya memilih membisu saat dilakukan tes ini-itu yang perlu dijawab. Sungguh tak mudah dokter menetapkan label medis bila tes kebohongan pun gagal memunculkan respons dari orang yang diperiksa, atau jika yang diperiksa mengaku tidak mampu, ada keterbatasan melakukan yang diperintahkan dokternya. Bisa lain pula hasilnya jika yang memeriksa kalah kharisma dengan yang sedang diperiksa.

Itu sebabnya kesahihan sertifikat sakit dari dokter yang berbeda untuk pasien yang sama belum tentu sama. Jika label sehat atau sakit dibuat dengan meninggalkan asas profesionalisme dokter, akan banyak muatan ikut menumpang di sana. Apabila muatan nonmedis dalam melabel sakit tidaknya seseorang lebih banyak dari muatan medisnya, betapa akan kecewanya setiap hati nurani.

◆◆◆

BILA sertifikat sakit masih menyimpan unsur sehat, dan sertifikat sehat masih bermuatan unsur sakit, yang tahu itu dusta cuma Tuhan dan dokternya. Namun, mendiskreditkan otoritas dokter yang disangsikan kesahihannya menetapkan label sakit, bukan sikap elok.

Begitu pula saat dipandang perlu membentuk tim dokter baru untuk memeriksa ulang kesehatan mantan Presiden Soeharto, seakan tim dokter lama dianggap kurang kompeten, tidak independen, tak transparan, atau dikira tidak jujur. Mengganti-ganti tim dokter pemeriksa seperti terjadi sekarang mengguncang martabat profesi dokter.

Terus terang, tak mudah menghadapi ketidakjujuran medis orang yang, misal, bisa lain tampilan di rumah atau di pesta, dan lain pula saat diperiksa dokter. Untuk itu, bukan saja diperlukan keterampilan dan kecerdikan medis, tetapi butuh hati nurani yang lebih berlimpah.

Tim dokter boleh sangat ahli, alat periksa boleh luar biasa canggih, perangkat tes dipilih yang paling mutakhir, tetapi hasil pemeriksaan jadi samar dan mungkin tidak sahih jika yang diperiksa masih punya ruang lebih lapang buat bersandiwara.

Dalam setiap kasus mana pun dokter tidak boleh gegabah menetapkan status medis pasien. Dokter yang berisiko terkecoh menetapkan status medis jangan-jangan orang yang mengaku dirinya pasien tidak koperatif selama diperiksa, perlu bijak dan cermat. Gegabah memutuskan yang salah jadi benar, dan benar jadi salah, bikin gelisah orang banyak.

Sungguh memprihatinkan jika label medis yang dokter tetapkan sudah kehilangan hati nurani. Selain pengkhianatan terhadap profesi, kebohongan medis menjadikan hukum tidak lagi jujur tak lagi adil. Misal, jika bukan pasien dilabel sakit, *so* pasti bikin ayam tertawa.

HENDRAWAN NADESUL
Dokter, pengasuh rubrik kesehatan di sejumlah media, penulis kolom, dan buku.

Hari /Tanggal /Bulan/ Tahun : SELASA / 18 / JUNI / 2002
Hlm/Kolom : 10 / 1-5
Sumber : Kompas / ~~Pikiran Rakyat~~ /
Penulis :
Subjek : KEJAHATAN / 364

Jalan Tol Makin Tidak Aman, Polisi Tak Berdaya

BERHATI-HATILAH bila berkendaraan di jalan tol, apalagi jika sopir mengantuk lantas terpaksa menepikan kendaraan untuk beristirahat. Jalan tol Jakarta-Cikampek, terutama di sekitar tempat peristirahatan di KM 18 Tambun dan KM 33 Cikarang, kini semakin tidak aman. Dalam kurun waktu Januari hingga pertengahan Juni tahun ini saja tercatat sudah delapan kasus perampokan yang dilakukan kawanan penjahat bersenjata tajam atau berpistol. Melihat luka dan ketakutan yang diderita korban serta cara perampok beraksi, disimpulkan bahwa semua kasus itu hanya bisa dilakukan oleh penjahat profesional.

Kompas mencatat, salah satu kejahatan sadis pada tahun ini adalah perampokan truk yang dilakukan oleh empat perampok di jalan tol KM 33 Cibatu, Cikarang, dan menewaskan sopirnya, Sukarmin. Tragisnya, peristiwa itu terjadi di sekitar tempat peristirahatan di depan sebuah warung yang dianggap aman. Meskipun perampok gagal menjarah uang Sukarmin karena dia berteriak, mereka sempat menusuk leher dan dada Sukarmin dengan sangkur hingga tewas.

Peristiwa sadis yang tergolong berani tersebut juga dilakukan delapan perampok yang menodong sekitar 50 penumpang bus di KM 18 Jatimulya, Tambun, pada 12 Juni lalu, juga di dekat tempat peristirahatan. Seorang penumpang sempat dibacok dan delapan jahitan pun menghiasi kepalanya. Meskipun tiga tersangka dapat ditangkap polisi, kejadian serupa masih terjadi juga setelah itu.

Kejadian terbaru dilaporkan hari Senin (17/6), saat seorang warga Serang, Banten, dirampok di tol antara Bekasi Timur-Cibitung. Setelah perampok berhasil mengambil alih mobil boks berisi tisu, korban, setelah diikat, lalu dibuang di daerah Sukamandi. "Kami belum mencatat laporan dan belum mengetahui namanya karena dia tidak membawa fotokopi STNK atau BPKB, juga barang bukti ikatan dan saksi," ujar seorang petugas Pelayanan Masyarakat (Yanmas) Kepolisian Resor (Polres) Bekasi.

Kejadian-kejadian tersebut belum termasuk pembajakan di dalam bus kota yang dilakukan sekawanan penjahat yang terhitung kejam juga. Menurut Kepala Pusat Komando Pengendalian Operasional Polres Bekasi Ajun Komisaris Andry Wibowo, pelaku kejahatan di jalan tol memang terbagi dua, yaitu pelaku yang naik bus dari luar jalan tol dan melakukan aksi di jalan tol ,serta pelaku yang merampok kendaraan yang berhenti di jalan tol dan biasanya dilakukan oleh warga sekitar.

◆◆◆

KEPALA Polisi Jalan Raya (PJR) Tol Jakarta-Cikampek Inspektur Satu Dasuki mengatakan, terdapat 11 tempat peristirahatan atau parkiran di sepanjang 72 kilometer jalan tol Jakarta-Cikampek. Tempat itu berada di KM 18, 21, 33, 34, 41, 42, 50, 52, 60, 62, dan 70. Lokasi di sekitar KM 18 dan 33 itulah yang tergolong rawan kejahatan. Bahkan, Polres Bekasi mencacat ada sekelompok preman yang memang khusus beraksi di sekitar KM 18 dan KM 33.

"Jumlah anggota kami 34 personel dan harus memantau jalan sepanjang 72 kilometer. Dalam sehari ada lima mobil patroli kami kerahkan secara rutin, kadang-kadang juga ditambah mobil patroli khusus atau mobil pribadi," kata Dasuki. Dia berterus terang, dirinya tidak bermaksud bersembunyi di balik kekurangan personel. "Namun, nyatanya memang demikian yang terjadi," ujar Dasuki. Akibatnya, sulit untuk mengamankan jalur jalan sepanjang 72 kilometer tersebut.

Dengan keterbatasan anggota, petugas PJR tetap beroperasi dan menempatkan anggota di tempat-tempat peristirahatan serta titik-titik rawan lain. Patroli lebih diperketat di waktu-waktu menjelang tengah malam hingga pagi hari. "Karena anggota memang kurang, kami lalu berkomunikasi dengan Jasa Marga lewat radio panggil, juga berkoordinasi dengan Polres Bekasi serta Karawang," jelas Dasuki.

"Pemberantasan kejahatan di jalan tol relatif lebih sulit dibanding di jalan kota," kata Andy Wibowo. Di jalan bebas hambatan, sopir yang dirampok sulit membelokkan mobil ke pos polisi atau polsek saat kejadian. Akses pertolongan penumpang juga relatif kecil. Selain itu, PJR juga tidak mungkin terus berada di suatu tempat karena memang fungsinya adalah *mobiling*. Inilah yang kemudian dimanfaatkan penjahat untuk beraksi. *Gray area* atau daerah abu-abu di jalan tol memang cukup tinggi, itu kami akui," paparnya.

Menurut Andry, tempat-tempat peristirahatan di jalan tol selama ini memang potensial sebagai tempat berjualan dan memberikan matapencaharian bagi warga sekitar. Untuk memudahkan komunikasi dengan perkampungan, pagar yang menghubungkan jalan tol dengan jalan desa pun dibobol. Hanya saja, dinding yang bobol lalu dimanfaatkan penjahat untuk keluar-masuk tol dan merampok.

◆◆◆

MARAKNYA kejahatan di jalan tol sempat pula dipantau Ketua Indonesian Police Watch (IPW) Bekasi John Dista. Mereka menilai fungsi keamanan dan ketertiban masyarakat yang disandang polisi semakin menurun seiring dengan meningkatnya kejahatan. "Saya melihat patroli saat ini jarang sekali dilakukan polisi, terutama di jalan tol. Memang saya mengerti keterbatasan anggaran dan personel di kepolisian, tetapi itu bukan sebuah alasan," paparnya.

Selain fungsi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), fungsi lain polisi sebagai aparat hukum dan *public service* juga melemah. Hal itu seiring pula dengan mentalitas oknum polisi yang memang masih buruk. "Banyak penjahat yang tertangkap, namun banyak juga yang dipendam, bahkan kasusnya dipetieskan. Itulah mengapa penjahat terus berkeliaran," ujar John.

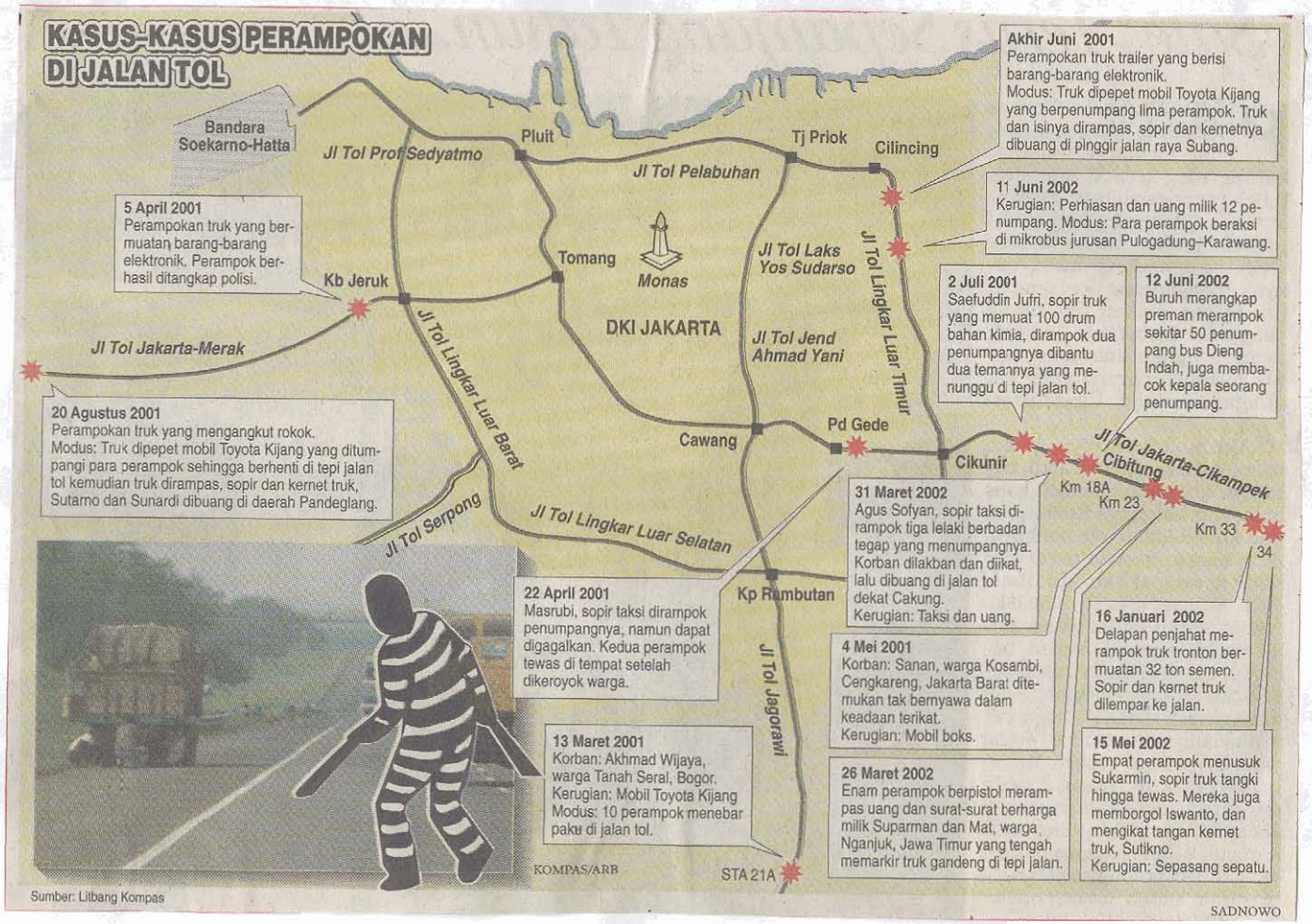
Lain lagi menurut Andry. Menurut dia, jalan keluar yang dapat dilakukan antara lain adalah dengan memasang semua nomor telepon polsek, polres, atau kantor PJR di bus-bus yang lewat di jalan tol. Penumpang yang dirampok dapat dengan segera menelpon lewat telepon genggam yang saat ini sudah merakyat. Yang penting lagi, Jasa Marga dan kepolisian harus membuat *setting* mengenai keamanan ke depan.

"Misalnya dengan menyediakan mobil patroli setiap jarak lima kilometer sehingga polisi langsung dapat mengejar begitu ada kejadian. Unit PJR semestinya menjadi direktorat independen tersendiri dan ada patroli khusus seperti dalam film CHIPS," tutur Andry. Persoalannya, apakah itu mungkin dilakukan dan kapan bisa dilakukan? (ivv)

Perpustakaan Unikom

Hari /Tanggal /Bulan/ Tahun : ...
Hlm/Kolom : ...
Sumber : Kompas / Pikiran Rakyat / ...
Penulis : ...
Subjek : ...

KASUS-KASUS PERAMPOKAN DI JALAN TOL



Sumber: Litbang Kompas

hlm. 357

Hari /Tanggal /Bulan/ Tahun : SELASA / 18 / JUNI / 2002
Hlm/Kolom : 15 /
Sumber : Kompas / Pikiran Rakyat /
Penulis : SURYANA, ACHMAD
Subjek : PANGAN / 363.8

World Food Summit: Aliansi Internasional Mengikis Kelaparan

PERTEMUAN Puncak Pangan Dunia baru saja dilangsungkan di Roma, Italia, dari tanggal 10 sampai 13 Juni 2002. Pertemuan ini dinamai World Food Summit: Five Years Later (WFS: fyl) karena diselenggarakan lima tahun setelah WFS pertama yang menghasilkan Deklarasi Roma tentang Ketahanan Pangan Dunia pada tahun 1996 (Rome Declaration on World Food Security). Sesuai dengan namanya, WFS: fyl dirancang untuk mengevaluasi pencapaian sasaran yang telah disepakati dalam Deklarasi Roma 1996, hambatan-hambatan yang dihadapi, dan cara untuk mengatasinya.

KESEPAKATAN utama para kepala negara dan pemerintahan dalam WFS tahun 1996 itu berupa komitmen bersama masyarakat dunia untuk mewujudkan ketahanan pangan bagi setiap orang, dan menghapuskan penduduk yang kelaparan di seluruh negara. Sasaran kuantitatifnya adalah mengurangi jumlah penduduk rawan pangan menjadi setengahnya paling lambat tahun 2015. Karena jumlah penduduk rawan pangan di dunia tahun 1996 diperkirakan sekitar 800 juta jiwa, maka sasaran pengurangannya sebesar 400 juta jiwa selama 20 tahun, atau rata-rata 20 juta jiwa per tahun.

Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia atau Food and Agriculture Organization (FAO) sebagai pemrakarsa dan penyelenggara melaporkan WFS: fyl dihadiri oleh 183 delegasi negara. Lebih dari 70 delegasi dipimpin langsung oleh kepala atau wakil kepala negara dan pemerintahan, selebihnya dipimpin oleh para menteri yang membidangi pembangunan pertanian dalam arti luas. Sebagian besar delegasi dari Benua Afrika dipimpin oleh presiden, sementara itu hanya dua negara maju yang menghadirkan pimpinan tertingginya, yaitu Italia (presiden dan perdana menteri) sebagai tuan rumah dan Spanyol (presiden) yang juga saat ini berperan sebagai pimpinan Uni Eropa. Dari Asia, delegasi Indonesia dipimpin presiden, utusan Cina menghadirkan wakil perdana menteri, sedangkan Jepang mengirimkan menteri pertanian perikanan dan kehutanan. Kebijakan Pemerintah Jepang ini sejalan dengan sikap negara-negara maju lainnya.

Dalam perhelatan akbar ini, dilakukan pula berbagai aktivitas dan pertemuan yang melibatkan berbagai organisasi internasional, lembaga keuangan internasional, dan lembaga nonpemerintah, parlemen serta sektor swasta dari berbagai negara. Jumlah peserta yang hadir dilaporkan sekitar 4.000 orang.

Negosiasi isi deklarasi

Konsep Deklarasi WFS: fyl ini sebenarnya sudah disiapkan jauh-jauh hari oleh FAO. Draf matang sudah siap pada bulan November 2001 karena rencananya WFS: fyl ini dilaksanakan waktu itu. Namun, karena terjadi peristiwa teror 11 September 2001 di Amerika Serikat, maka dengan alasan keamanan, kegiatan ini diundurkan dan baru dilaksanakan bulan Juni 2002.

Walaupun draf tersebut telah disiapkan secara matang oleh FAO, perdebatan hangat dan negosiasi intensif yang sebenarnya baru terjadi sela-

[redacted]pat hari terakhir sebe-[redacted]FS: fyl diselenggarakan, yaitu dari tanggal 6 sampai 8 Juni 2001. Perubahan draf dilakukan dalam *open-ended working group* yang dibentuk oleh Komisi Ketahanan Pangan (Committee on World Food Security) FAO. Dalam kelompok kerja ini, setiap butir dari rancangan deklarasi dibahas dan harus disepakati secara aklamasi. Karena itulah pencapaian kesepakatan setiap paragraf menjadi berlarut-larut karena diupayakan menampung berbagai pandangan, sikap, dan kepentingan. Pembahasan dilakukan pagi, siang dan malam hari.

Alotnya diskusi tercermin dari diperlukannya perpanjangan waktu satu hari kerja sehingga draf akhir deklarasi baru disepakati oleh Komisi Ketahanan Pangan FAO pada hari minggu petang. Keesokan harinya, draf deklarasi ini dilaporkan kepada para kepala delegasi tingkat tinggi dan diterima secara aklamasi pada

Hari /Tanggal /Bulan/ Tahun : ...../...../...../.....
Hlm/Kolom : ...../.....
Sumber : Kompas / Pikiran Rakyat / .....
Penulis : .....
Subjek : .....

sidang hari pertama WFS: fyl, 10 Juni 2002.

Alotnya pembahasan draf deklarasi disebabkan oleh perbedaan pandangan dan kepentingan antara negara-negara berkembang yang diwakili oleh kelompok G-77 dan negara-negara maju, terutama dari Uni Eropa, Amerika Serikat, dan Jepang. Sedikitnya terdapat enam topik yang memerlukan pembahasan lama, bertele-tele, sampai pada debat pemilihan kata yang tepat.

Topik-topik yang diperjuangkan kelompok G-77 yang memerlukan pembahasan panjang adalah berkaitan dengan: pembentukan Aliansi Internasional Mengikis Kelaparan; peningkatan bantuan negara maju bagi pembangunan di negara berkembang, terutama untuk sektor pertanian dan pedesaan; serta pengembangan perdagangan internasional yang adil, termasuk peningkatan akses pasar bagi produk-produk pertanian negara berkembang.

Topik-topik lain adalah pembentukan *trust fund* untuk percepatan produksi pangan dan memperbaiki akses pangan di negara berkembang dan negara defisit pangan, yang diusulkan FAO; pemanfaatan bioteknologi dalam bidang pertanian dan pangan, yang dibawa delegasi Amerika Serikat; dan penyusunan *code of conduct* mengenai hak atas pangan yang didukung oleh organisasi nonpemerintah.

Komitmen politik

Pada prinsipnya Deklarasi Roma 2002 ini berupa berbagai pernyataan sikap, kesepakatan, dan komitmen bersama dari para kepala negara dan pemerintahan dalam memperbarui, menegaskan, dan mengupayakan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Deklarasi Roma 1996. Hal ini dalam upaya mewujudkan ketahanan pangan dan mengurangi kemiskinan serta kelaparan. Pernyataan kali ini dituangkan dalam Declaration of WFS: fyl yang diberi judul *International Alliance Against Hunger* atau Aliansi Internasional Mengikis Kelaparan. Judul ini merupakan usul inisiatif dari kelompok G-77.

Secara utuh, deklarasi ini memuat 21 paragraf mukadimah, 12 paragraf pernyataan sikap komitmen politik, 14 paragraf pemahaman mengenai tantangan yang dihadapi, dan sembilan paragraf mengenai alokasi sumber daya.

Butir-butir Deklarasi Roma 2002 mengenai komitmen politik terfokus pada penegasan dan tekad memperbarui kembali komitmen global yang dibuat dalam Deklarasi Roma 1996. Karena kinerja pencapaian sasaran dalam lima tahun pertama tidak memuaskan, para kepala negara dan pemerintahan bersepakat untuk mempercepat implementasi rencana aksi dari WFS. Secara kuantitatif, sasaran pengurangan penduduk rawan pangan sejak tahun 2002 yang harus dicapai adalah sekitar rata-rata 22 juta/tahun.

Untuk mencapai hal itu, dalam komitmen politik ini ditegaskan bahwa tanggung jawab perwujudan ketahanan pangan nasional terletak pada pemerintahan nasional negara masing-masing, bekerja sama dengan masyarakat madani dan sektor swasta di negara tersebut, dengan dukungan masyarakat internasional. Untuk itu, para pihak terkait (pemerintah, masyarakat, swasta, serta organisasi internasional) diminta untuk memperkuat berbagai upaya yang terkoordinasi untuk mencapai sasaran tersebut dalam suatu aliansi internasional mengikis kelaparan.

Komitmen politik dalam Deklarasi 2002 ini menegaskan pentingnya pembangunan pertanian dan pedesaan dalam mengikis kelaparan dan kemiskinan. Para deklarator menyadari pembangunan pertanian dan pedesaan mempunyai peran kunci dalam pemantapan ketahanan pangan, karena 70 persen penduduk miskin dunia hidup di pedesaan dan mengandalkan sumber penghidupannya dari sektor pertanian. Oleh karena itu, upaya pencapaian sasaran mengatasi kelaparan dan kemiskinan harus berlandaskan pula pada upaya peningkatan produktivitas pertanian dan perbaikan produksi, dan distribusi pangan.

Berbagai tantangan diidentifikasi dalam upaya pencapaian sasaran Deklarasi WFS: fyl ini, dan para deklarator sepakat untuk mengatasinya secara serius. Beberapa tantangan yang dikemukakan di antaranya adalah perlunya kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, perlunya aspek kecukupan gizi dan keamanan pangan mendapat perhatian dalam ketahanan pangan, dan perlunya pengembangan standar keamanan pangan dan kesehatan tanaman, serta hewan yang dapat dilindungi konsumen tetapi tidak menjadi alat penghambat perdagangan pangan.

Selain itu, penanganan atas ancaman wabah kesehatan seperti HIV/AID, malaria, dan tuberkulosis, dan penanganan keadaan darurat kerawanan pangan perlu digarap lebih serius. Dalam aspek pemeliharaan kapasitas produksi, tantangannya adalah pengelolaan hutan dan sumber daya perikanan berkelanjutan, dan penelitian pertanian untuk pengembangan dan pemanfaatan teknologi baru, termasuk bioteknologi.

Alokasi sumber daya

Kesepakatan mengenai alokasi sumber daya pembangunan merupakan hasil kompromi yang alot. Dalam hal pembentukan FAO Trust Fund, bunyi kesepakatan tersebut hanya sampai pada rumusan: mengimbau seluruh negara, organisasi internasional pemerintah dan nonpemerintah, sektor swasta dan mitra pembangunan lainnya untuk mempertimbangkan kontribusi sukarela (*to consider voluntary contribution*) untuk FAO Trust Fund bagi pengembangan ketahanan pangan dan keamanan pangan. Imbauan ini merupakan bentuk kompromi kelompok G-77 dan negara maju dari rumusan sebelumnya yang lebih tegas. Rumusan awal yang diusulkan adalah membentuk FAO Trust Fund dengan dana awal sebesar 500 juta dollar AS, namun negara-negara maju terlihat enggan terlibat dalam pengumpulan dana semacam ini.

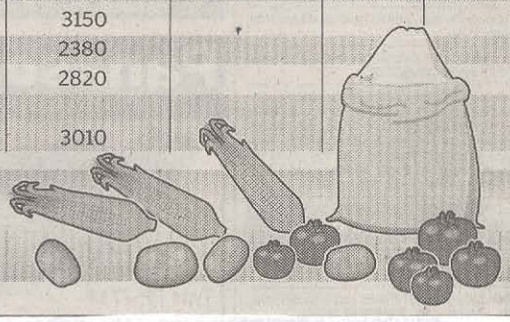
Kedua, para deklarator mengimbau negara maju yang belum melaksanakannya untuk melakukan langkah-langkah konkret mencapai target bagi Overseas Development Assistance (ODA) sebesar 0,07 persen dari Produk Nasional Bruto (GNP) bagi negara berkembang, dan 0,05 persen-0,20 persen dari GNP bagi negara terbelakang. Butir ini tidak banyak dibahas karena memang sudah disepakati dalam Konferensi PBB yang lalu, tetapi belum seluruhnya dipatuhi implementasinya.

Ketiga, kepala negara dan pemerintahan mengimbau adanya proporsi yang cukup (*adequate share*) bagi pembiayaan pembangunan pertanian dan pedesaan, baik dari anggaran pemerintah masing-masing, dari kerja sama bilateral dan multilateral negara-negara maju dalam kerangka ODA, maupun dari lembaga-lembaga keuangan internasional. Imbauan ini didasarkan atas kenyataan bahwa dalam bebera-

Hari / Tanggal /Bulan/ Tahun : ...../...../...../.....
Hlm/Kolom : ...../.....
Sumber : Kompas / Pikiran Rakyat / .....
Penulis : .....
Subjek : .....

INDIKATOR PANGAN DAN GIZI

Negara	Proporsi Penduduk Rawan Pangan (%) 1997-1999	Jumlah Penduduk Rawan Pangan (juta) 1997-1999	Ketersediaan Energi per Hari per Kapita Kkal/hari 1997-1999	Jumlah Balita di Bawah Berat Badan Normal (%) 1995-2000	Harapan Hidup (tahun) 2000	Tingkat Kematian Balita (%) 2000
Asia dan Pasifik	16	497,1	2710	17	69	34
Asia Timur	10	126,9	3020			
Oceania	26	1,2	2180			
Asia Tenggara	13	65,9	2660			
Kamboja	37	4,6	1980	46	56	95
Indonesia	6	12	2900	26	66	35
Filipina	24	17,2	2330	28	69	30
Thailand	21	12,9	2410	19	70	25
Asia Selatan	24	303	2400	46		72
Amerika Latin dan Karibia	11	53,6	2830	8		30
Amerika Utara	5	5	3150			
Amerika Tengah	19	6,4	2380			
Amerika Selatan	10	33,4	2820			
Timur Tengah dan Afrika Utara	9	32,5	3010			



Sumber: FAO

pa tahun terakhir secara umum telah terjadi penurunan alokasi dan proporsi pembiayaan bagi sektor tersebut. Padahal, pembangunan pertanian dan pedesaan merupakan salah satu kunci sukses bagi pengentasan kemiskinan, dan mengikis kelaparan. Ini pun merupakan kesepakatan kompromi, karena sebelumnya kelompok G-77 menghendaki besarnya alokasi dana untuk pembangunan pertanian dan pedesaan sebesar 20 persen dari total dana pembangunan.

Penutup

Mudah-mudahan perhelatan akbar di Roma tahun 2002 ini ada hasilnya, dan deklarasi tersebut diterjemahkan secara konkret pimpinan negara dan pemerintahan, masyarakat dan sektor swasta, baik pada tingkat internasional maupun pada tingkat masing-masing negara, termasuk Indonesia. Jika tidak, lima tahun lagi dari sekarang, kembali kita akan berkumpul membicarakan hal yang sama tanpa mencatat kemajuan apa pun seperti sasaran yang diharapkan.

◆ ACHMAD SURYANA
Kepala Badan Bimas Ketahanan Pangan dan Ketua Delegasi RI pada Sidang Komite Ketahanan Pangan FAO ke 28, 6 - 8 Juni 2002.

Hari /Tanggal /Bulan/ Tahun : MINGGU / 18 / AGUSTUS / 2002
Hlm/Kolom : 37 / 1-3
Sumber : Kompas / ~~Pikiran Rakyat~~ /
Penulis : Basri, Muhammad Chatib.
Subjek : KORUPSI / 364.1

Pasar Gelap Peraturan

Muhammad Chatib Basri

◆

TIAP bangsa punya kekeliruannya sendiri. Itu sebabnya sejarah bangsa-bangsa menjadi menarik dipelajari. Lalu, apa kekeliruan besar negeri ini ? Barangkali, korupsi.

BICARA tentang korupsi, saya jadi ingat pada Lord Acton, guru besar Sejarah Modern di Universitas Cambridge yang hidup di abad ke-19. Dengan adagiumnya yang terkenal ia menyatakan: *Power tends to corrupt, and absolute power corrupt absolutely*.... Korupsi dan kekuasaan memang dua hal yang begitu erat di negeri ini. Sampai sejauh mana kaitan keduanya?

Dalam konsep ekonomi politik, *power* akan menyangkut kekuasaan menentukan alokasi ekonomi. Tidak menghetankan bahwa kekuasaan kemudian memiliki nilai ekonomi sehingga ia merupakan komoditas yang bisa diperdagangkan. Karena itu, intervensi pemerintah dalam perekonomian cenderung membuka ruang bagi korupsi. Mengapa demikian? Karena bagi pelaku ekonomi, peraturan negara akan berpengaruh kepada peningkatan atau penurunan pendapatan. Implikasinya, keputusan itu adalah suatu komoditas yang logis diperebutkan. Di sini kekuasaan menjadi komoditas.

Studi kuantitatif yang saya lakukan menunjukkan bahwa dalam pertengahan tahun 1975 pemberian proteksi impor kepada industri manufaktur dipengaruhi oleh kepentingan ekonomi nasional dan pola patronial. Ini terlihat dengan adanya tingkat proteksi impor yang tinggi untuk sektor-sektor yang dianggap strategis buat kepentingan negara, berorientasi pasar dalam negeri dan padat tenaga kerja terampil.

Selain itu, industri yang didominasi oleh pengusaha yang dekat dengan kekuasaan juga memperoleh perlindungan yang tinggi. Pola ini kemudian berubah di tahun 1987. Proteksi diberikan kepada industri yang didominasi kapitalis kroni. Kita bisa punya daftar yang panjang untuk ini, mulai dari tepung terigu, susu, mi, besi baja, sampai plastik.

Kapasitas lobi dan konsentrasi pasar juga menentukan tingkat proteksi. Artinya, pemberian proteksi didasarkan kepada dua hal. Yang pertama, kedekatan antara *rent seekers* dengan pemerintah dan yang kedua lobi dari dunia usaha untuk mempengaruhi kebijakan. Perhitungan kuantitatif yang saya lakukan dengan menggunakan model Grossman dan Helpman menunjukkan bahwa industri yang didominasi oleh kapitalis kroni menikmati tingkat proteksi impor yang lebih tinggi dibandingkan dengan industri yang tak didominasi para kroni. Bahkan, industri yang didominasi kapitalis kroni menikmati rata-rata tambahan tingkat proteksi efektif sebesar 300 persen pada tahun 1975, 107 persen pada tahun 1987, dan 96 persen pada tahun 1995.

Tambahan tingkat proteksi ini memang menunjukkan gejala penurunan sejalan dengan liberalisasi perdagangan yang dilakukan pemerintah sejak tahun 1985. Dan, sejalan dengan liberalisasi ekonomi, kapitalis kroni kemudian masuk dalam bidang jasa, sumber daya alam dan barang *non-traded* seperti infrastruktur yang tak tersentuh liberalisasi pada waktu itu.

Pola pemberian proteksi kepada kapitalis kroni ini menunjukkan bukti tentang perilaku *protection for sale*. Di sini kita melihat bagaimana kekuasaan yang dimiliki oleh pembuat kebijakan melalui peraturan dalam bentuk proteksi akhirnya menghasilkan satu bentuk relasi aktivitas ekonomi rente. Dengan kata lain, kekuasaan memungkinkan terjadinya korupsi, persis seperti yang disampaikan dalam adagium Lord Acton.

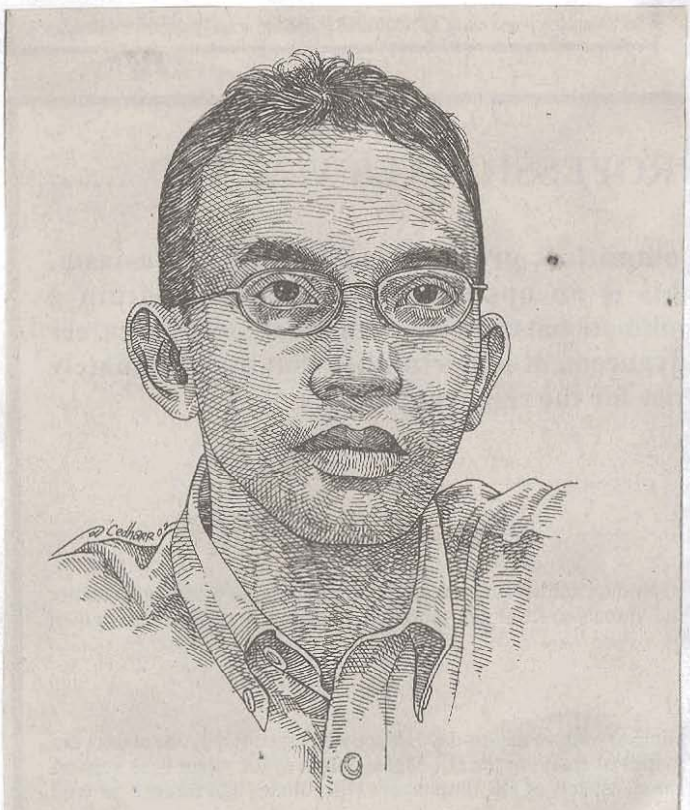
◆◆◆

POLA korupsi tampaknya tak mengalami perbaikan atau bahkan mungkin memburuk setelah jatuhnya Soeharto. Apakah kekuasaan tetap menjadi sumber akumulasi kapital setelah krisis? Tampaknya memang tak ada perubahan setelah periode reformasi. Pejabat pemerintah dengan kekuasaannya untuk menentukan izin, pajak, dan peraturan lainnya tetap menggunakan kekuasaan sebagai alat untuk memperkaya diri.

Akibatnya, di luar pajak yang resmi ditarik, dunia usaha juga harus membayar pungutan atau biaya tambahan dalam menjalankan aktivitas usahanya. Menarik jika mengaji studi yang dilakukan oleh LPEM-FEUI tahun 2001 yang dilakukan oleh Ari Kuncoro dan Ari Damajanti dan kawan-kawan tentang *cost of doing business*. Studi ini mencakup 1.736 perusahaan yang tersebar di 60 kabupaten/kota. Dengan cuplikan yang luas, sedikit banyak bisa dipotret masalah pungutan atau korupsi di Indonesia.

Telah menjadi rahasia umum bahwa biaya tambahan untuk menyelesaikan pelbagai urus-

Hari /Tanggal /Bulan/ Tahun : ...../...../...../.....
Hlm/Kolom : ...../.....
Sumber : Kompas / Pikiran Rakyat / .....
Penulis : .....
Subjek : .....



an dengan birokrasi di pemerintahan hampir selalu dibutuhkan. Penelitian LPEM-FEUI menunjukkan bahwa 79 persen dari responden harus mengeluarkan biaya tambahan dalam berhubungan dengan birokrasi pemerintahan (**Grafik 1**).

Mengenai besarnya biaya tambahan yang harus dikeluarkan, studi ini menunjukkan bahwa untuk daerah Jawa dibutuhkan biaya tambahan rata-rata sebesar 9,7 persen (dari total biaya produksi), sedangkan untuk luar Jawa dibutuhkan biaya tambahan rata-rata sebesar 11,2 persen (**Grafik 2**).

Jika dilirik dari segi ukuran perusahaan, kita dapat melihat bahwa perusahaan skala menengah kecil harus mengeluarkan biaya tambahan sebesar 11 persen (dari total biaya produksi), sedangkan perusahaan dengan skala besar mengeluarkan biaya tambahan 8 persen (**Grafik 3**).

Yang menarik, penelitian ini juga menunjukkan bahwa responden (dunia usaha) bersedia membayar pajak tambahan rata-rata sebesar 8,7 persen (dari biaya produksi) setahun, asalkan biaya tambahan dapat dihilangkan sepenuhnya. Kesediaan dunia usaha membayar pajak tambahan untuk menggantikan biaya tambahan menunjukkan adanya korelasi yang searah antara pungutan dengan pajak tambahan. Saya kira alasan kesediaan untuk membayar pajak yang lebih tinggi menyangkut soal kepastian.

Pembayaran pajak seperti ini lebih memberikan manfaat karena biaya dapat diprediksi dengan pasti dan dapat diinternalkan dalam perhitungan perusahaan. Temuan ini menunjukkan bahwa persoalan kepastian peraturan merupakan faktor penting yang mempengaruhi kelancaran usaha. Namun, persoalan yang harus diingat adalah bahwa bukan perarti kalau pungutan dilegalkan dalam bentuk pajak, maka pungutan serta merta akan hilang. Pungutan akan tetap terjadi selama kekuasaan tetap dapat diperdagangkan.

Pada **grafik 2 dan 3** kita juga dapat melihat bahwa biaya tambahan rata-rata yang harus dikeluarkan adalah sekitar 10 persen, angka ini lebih tinggi dibandingkan besarnya pajak tambahan yang bersedia dibayar dunia usaha, yang sebesar 8,7 persen. Kesediaan membayar dunia usaha sudah lebih rendah dibandingkan biaya tambahan yang harus dibayar. Implikasinya, yaitu biaya tambahan ini sudah menjadi beban bagi dunia usaha.

◆◆◆

SECARA konseptual korupsi atau penyuapan adalah semacam pajak tak resmi untuk dunia usaha (MacLeod, 2001). Karena itu, seperti juga dalam pajak, ada tingkat optimum dari penyuapan, yang di bawah titik itu korupsi dan penyuapan mungkin masih akan memberikan manfaat sebagai pelumas untuk memperlancar bisnis, tetapi jika terlalu tinggi korupsi akan menjadi beban. Studi yang dilakukan oleh Lui (1985), misalnya, menunjukkan bahwa dalam beberapa hal korupsi malah bisa meningkatkan efisiensi.

Argumen Lui memang terkesan mengejutkan, tetapi ada alasan teoretis yang cukup kuat dibelakang argumen ini. Perspektif ini dalam literatur ekonomi politik dikenal dengan nama *efficient grease* atau pelumas yang efisien. Dalam model teoretisnya yang ketat, risalah Lui di *Journal of Political Economy* menunjukkan bahwa besarnya penyuapan mencerminkan perbedaan biaya kebatalan dari tiap perusahaan. Jika perusahaan tersebut efisien, maka mereka hanya bersedia membayar korupsi yang lebih rendah. Dengan kata lain, penyuapan dapat memperpendek waktu dalam berurusan dengan birokrasi.

Namun, studi yang dilakukan oleh Kaufman dan Shang (1999) menunjukkan bahwa model pelumas yang efisien ternyata tidak mendapat dukungan dalam dataran empiris. Mereka menemukan adanya hubungan yang positif antara inefisiensi waktu dengan tingkat

Hari /Tanggal /Bulan/ Tahun : ...../...../...../.....
Hlm/Kolom : ...../.....
Sumber : Kompas / Pikiran Rakyat / .....
Penulis : .....
Subjek : .....

penyuapan. Dengan kata lain, semakin tinggi inefisiensi waktu dalam bisnis semakin besar penyuapan yang harus diberikan.

Bagaimana dengan Indonesia? Studi yang dilakukan LPEM menunjukkan bahwa dalam kurun ketika survei ini diadakan (tahun 2001), ternyata penyuapan tidak memperpendek waktu dalam berhubungan dengan birokrasi. Malahan terdapat korelasi searah antara penyuapan dengan waktu yang dihabiskan dalam berhubungan dengan birokrasi. Artinya, walau dengan tingkat penyuapan yang besar, waktu yang dibutuhkan untuk berurusan dengan birokrasi justru meningkat.

Ada gejala bahwa pejabat pemerintah cenderung memungut biaya tambahan berdasarkan kemampuan perusahaan membayar. Semakin tinggi kemampuan itu semakin besar pula waktu yang dibutuhkan dalam berhubungan dengan birokrasi. Selain itu, saya duga, sejalan dengan terdistribusinya kekuasaan, maka "korupsi juga semakin merata dan terdistribusi dengan baik".

Itulah yang membuat penyuapan tidak lagi memperpendek biaya transaksi, karena semakin banyak orang yang harus disuap walaupun mungkin jumlahnya tak lebih besar dibandingkan dengan dulu. Selain itu, studi ini juga menemukan hubungan searah antara ketidakpastian dengan waktu yang dihabiskan ketika berurusan dengan birokrasi. Semakin tinggi ketidakpastian semakin tinggi waktu yang dihabiskan untuk berhubungan dengan birokrasi. Temuan ini menyiratkan bahwa persoalan ekstrapungutan dan ketidakpastian akan memberikan dampak negatif kepada iklim usaha di Indonesia.

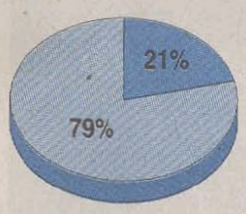
Studi-studi ini menunjukkan bagaimana peraturan dan intervensi pemerintah telah berubah fungsi menjadi komoditas. Benar bahwa korupsi bukan sebuah nasib yang dialami bangsa ini, tapi sedihnya, pasar gelap peraturan seperti hadir secara permanen bersama kita. Ironisnya, perdagangan peraturan tetap merupakan bisnis yang paling menguntungkan bagi pemerintah yang berkuasa.

MUHAMMAD CHATIB BASRI
Staf Pengajar Fakultas Ekonomi, UI, dan Wakil Kepala LPEM-FEUI bidang Penelitian

Hari /Tanggal /Bulan/ Tahun : ...../ ...../...../.....
Hlm/Kolom : ...../.....
Sumber : Kompas / Pikiran Rakyat / .....
Penulis : .....
Subjek : .....

GRAFIK 1

URUSAN DENGAN PEMERINTAH MEMBUTUHKAN BIAYA TAMBAHAN



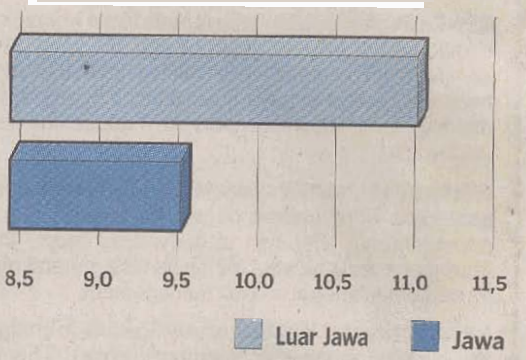
Setuju Tidak Setuju

Sumber: LPEM-FEUI (2001)



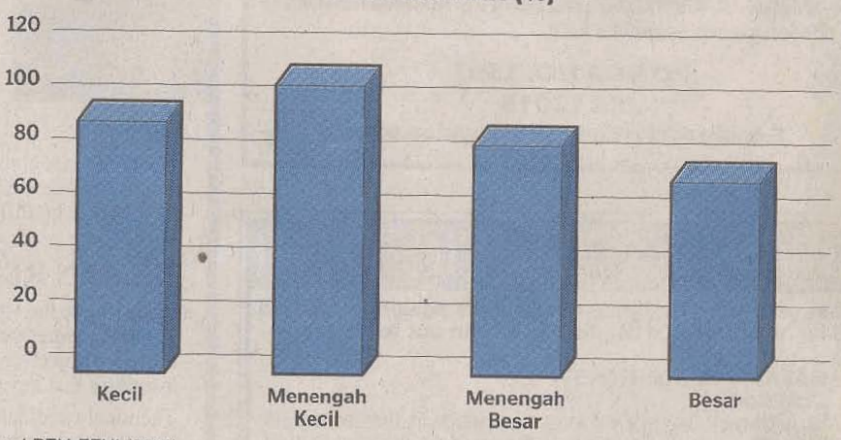
GRAFIK 2

BIAYA TAMBAHAN YANG HARUS DIKELUARKAN (%)



GRAFIK 3

BESARNYA BIAYA TAMBAHAN MENURUT UKURAN PERUSAHAAN (%)



Sumber: LPEM-FEUI (2001)

Hari /Tanggal /Bulan/ Tahun : MINGGU / 22 / DESEMBER / 2002
Hlm/Kolom : 7 & 11 /
Sumber : Kompas / ~~Pikiran Rakyat~~ /
Penulis :
No_Klass/Subjek : PELEDAKAN BOM / Bali / 364.1

Dari Rekonstruksi Bom Bali

Peledakan Direncanakan dengan Rapi

SOLO, KOMPAS — Pelaksanaan rekonstruksi (reka ulang) pertemuan para tersangka kasus peledakan bom Bali di Solo semakin menguatkan dugaan polisi bahwa peledakan bom pada tanggal 12 Oktober 2002 itu sudah direncanakan dengan rapi. Dalam pertemuan di Solo itu, misalnya, telah dilakukan pembagian tugas di antara para tersangka yang kini sudah ditahan dan beberapa tersangka lain yang masih buron.

"Rekonstruksi ini juga menguatkan bahwa sebelumnya mereka saling kenal, seperti Imam Samudra dan Muklas yang selama ini membantah tidak saling mengenal," kata Wakil Kepala Badan Hubungan Masyarakat (Humas) Markas Besar Kepolisian Negara RI (Mabes Polri) Brigjen (Pol) Edward Aritonang seusai pelaksanaan rekonstruksi di Solo, Sabtu (21/12).

Akan tetapi, Tim Pembela Muslim (TPM) justru melihat sejumlah kelemahan dari rekonstruksi tersebut. Menurut Ketua TPM Achmad Michdan, pertemuan-pertemuan di Solo itu bukan untuk merencanakan peledakan bom di Bali, melainkan untuk merencanakan aksi *sweeping* terhadap warga asing di Solo.

Rekonstruksi di Solo yang menghadirkan delapan tersangka dari Bali itu semula direncanakan berlangsung di tiga tempat, yaitu di rumah mertua Hernianto di Desa Manang RT 2 RW II Kecamatan Grogol, Sukoharjo; rumah kontrakan Imam Samudra di Desa Dukuh, Kecamatan Sanggrahan, Sukoharjo; dan rumah kontrakan Bambang Setiyono di Kampung Sayangan, Kecamatan Laweyan, Solo. Namun, rekonstruksi di rumah kontrakan Imam Samudra di Solo batal dilaksanakan karena dua tersangka—Rauf dan Amin—mengatakan tempat tersebut bukan tempat pertemuan mereka dengan Imam Samudra. Polisi berusaha mencari tempat yang dimaksud, tetapi tidak berhasil karena saksi kunci yang tahu lokasi itu masih buron.

Delapan tersangka yang kemarin didatangkan dari Bali adalah Imam Samudra alias Abdul Azis, Hernianto, Agus alias Andi Hidayat, Junaedi alias Amin, Andre Oktavia alias Yudi, Amrozi alias M Rozi, Ali Gufron alias Muklas, dan Abdul Rauf. Mereka didampingi Ketua Tim Investigasi Peledakan Bom di Kuta Inspektur Jenderal (Irjen) Made Mangku Pastika dan dua anggota TPM, yaitu Achmad Michdan dan Qodar Faisal.

Dikawal ketat

Para tersangka tiba di Bandara Adi Sumarmo, Boyolali pada pukul 08.40 dengan menggunakan pesawat carteran Merpati MFG jenis Fokker 27. Dengan pengawalan ketat dari anggota brigade mobil (Brimob) bersenjata, mereka langsung dibawa ke tempat rekonstruksi menggunakan dua mobil L 300 dan satu kendaraan taktis (rantis).

Di luar pengawalan langsung kepada para tersangka, dalam rekonstruksi yang menjadi tontonan ribuan warga Solo itu polisi menerjunkan 200 personel dari Kepolisian Resor (Polres) Sukoharjo, Brimob, dan Kepolisian Wilayah (Polwil) Surakarta.

Menurut Made Mangku Pastika, dalam penyidikan sebenarnya sudah terungkap adanya pertemuan antara Imam Samudra dengan lima orang dari Banten atau yang biasa [redacted] Kelompok Serang. Mereka adalah Abdul Rauf, Yudi, Iqbal, Amin, dan Agus. Di tempat itulah Imam membagi tugas kepada lima anak buahnya dan memberikan tiket pesawat ke Bali.

Namun, Achmad Michdan menyatakan bahwa kelima tersangka membantah pertemuan di rumah Imam Samudra. "Tak hanya Rauf dan Amin tapi empat-empatnya membantah," katanya.

Tersangka baru

Dari rekonstruksi terungkap, di rumah mertua Hernianto tujuh tersangka merencanakan peledakan bom Bali dengan melakukan pertemuan sebanyak dua kali pada akhir Juli 2002 dan pertengahan Agustus 2002. Mereka yang terlibat dalam pertemuan itu adalah Zulkarnaen, Muklas, Amrozi, Imam Samudra, Dulmatin, Umar Kecil, dan Idris alias Abdul Goni. Mengenai Zulkarnaen, Pastika mengatakan ia adalah Panglima Laskar Askari Islamiyah Indonesia yang masih terus dikejar.

Zulkarnaen yang asal Sragen tersebut merupakan panglima dari sejenis tentara Islam yang ada dalam Jemaah Islamiyah (JI). "Di sini jelas bahwa dia terlibat perencanaan bom Bali, pasalnya d[redacted] berunding di rumah He[redacted] tc dan datang pertama kali," kata Pastika yang juga yakin posisi Zulkarnaen di JI sangat penting.

Dalam rekonstruksi digambarkan, empat tersangka datang ke rumah tersebut, yaitu Imam Samudra, Dulmatin, Zulkarnaen, dan Hernianto. Sementara empat tersangka lainnya mengendarai mobil

Hari /Tanggal /Bulan/ Tahun : ...../...../...../.....
Hlm/Kolom : ...../.....
Sumber : Kompas / Pikiran Rakyat / .....
Penulis : .....
No_Klass/Subjek : .....

sedan Toyota warna putih bernomor B 47 SW yang dikemudikan seorang polisi yang berperan sebagai Ali Imron. Idris duduk di samping sopir, sementara di kursi belakang terdapat Muklas di sebelah kanan dan Amrozi di sebelah kiri. Turun dari mobil, Muklas menggandeng Amrozi untuk memasuki samping rumah Hernianto yang tertutup tirai.

Selama rekonstruksi berlangsung, Imam Samudra yang berada di luar rumah menyaksikan rekonstruksi itu sambil berkali-kali meneriakkan "Allahu Akbar". Ketika seorang wartawan meminta agar ia berbicara, Imam malah berteriak: "Perang belum usai."

Selanjutnya, Imam Samudra tampak santai dan mengobrol dengan tim gegana, bahkan kertas nama yang digantungkan di lehernya dipakai untuk kipas. Sebelum memeragakan menaiki sepeda motor, ia mengarahkan telunjuk kanan ke atas sampai tiga kali sambil tersenyum.

Berbeda dengan Imam Samudra, Amrozi dengan gayanya yang khas, sambil cengar-cengir melakukan apa yang disuruh oleh petugas untuk mengulang apa yang telah dilakukan di rumah itu. Digambarkan, Amrozi menerima telepon dari seseorang melalui *handphone*.

Bangunan rumah mertua Hernianto tampak belum selesai, terlihat dari tembok batu bata belum tertutup semen dan dicat. Lantai rumah itu sendiri masih diplester semen dan belum dibeton. Di depan rumah berukuran 20x10 meter itu terdapat pohon jati dan pohon mangga.

Di tempat ketiga yang berlokasi di Sayangan, rekonstruksi hanya dilakukan oleh Rauf dan Yudi yang mengaku pernah tinggal di rumah kontrakan Bambang Setiyono tersebut. Di rumah itulah, beberapa waktu lalu polisi menemukan dokumen-dokumen JI yang kemudian disebut sebagai pusat pengendali JI di Solo.

Selama rekonstruksi, animo masyarakat Solo untuk melihat para tersangka bom Bali sangat besar. Sejumlah warga mengaku tidak mengenal para tersangka. "Rumah mertua Hernianto itu selalu tertutup, padahal saya sering sekali melewati rumah ini, tetapi saya tidak pernah melihat Hernianto. Mertuanya pun seperti tidak mengenal tetangga," katanya.

Keterkaitan Ba'asyir

Pastika juga menjelaskan, setelah kepolisian menemukan dokumen JI yang menunjuk Amirul Mujahidin Indonesia Abu Bakar Ba'asyir sebagai pimpinan JI, kini kepolisian tengah mengarahkan penyidikannya pada kemungkinan keterlibatan Ba'asyir pada peledakan bom Bali. "Ali Gufron alias Muklas berperan sebagai Mantiqi Ula mengepalai wakalah-wakalah dari JI. Sementara JI didirikan oleh Abu Bakar Ba'asyir dan almarhum Abdulah Sungkar. Yah, silakan Anda kaitkan sendiri dengan posisi Ba'asyir seperti itu," ujar Pastika.

Sebenarnya, lanjut Pastika, sejauh ini sudah ada upaya untuk mengaitkan Ba'asyir dengan bom Bali, tetapi hingga kini belum ada tersangka yang mau mengatakan keterkaitan Ba'asyir.

Sementara Aritonang mengatakan, kelompok yang terlibat dalam perencanaan bom Bali terstruktur dan dibagi berdasarkan perannya. "Mereka tidak mempunyai pimpinan, tetapi mereka berperan sebagai *controller, commander,* dan pengumpul bahan utama dan bahan tambahan untuk meledakkan bom. Tetapi, tidak menutup kemungkinan peran mereka berbeda di tempat lain," kata Aritonang di Bandara Adi Sumarmo.

Sementara itu, Kepala Polri Jenderal (Pol) Da'i Bachtiar menegaskan, rekonstruksi tentang peledakan bom untuk mengukur intensitas besarnya ledakan tidak mungkin dilakukan. "Begitu saya menyuruh saja itu sudah salah. Rekonstruksi tidak harus begitu, kalau mereka saya suruh buat bom lalu meledakkannya, sama saja saya melanggar aturan. (Pembuatan) Bom itu harus ada ketentuannya," katanya seusai mengikuti Wisuda Purnawira Perwira Tinggi Polri Tahun 2002 di Akademi Kepolisian, Semarang, Jawa Tengah.

Sementara itu dari Lamongan, Jawa Timur, dilaporkan, menurut rencana, Minggu (22/12) pagi ini, Tim Investigasi Peledakan Bom Bali akan membawa tiga dari delapan tersangka yang melakukan rekonstruksi di Solo, Jawa Tengah, untuk melakukan rekonstruksi rapat rencana peledakan bom Bali di Desa Tenggulun, Kecamatan Solokuro, Lamongan. Tiga tersangka yang akan melakukan rekonstruksi di rumah Amrozi tersebut adalah Amrozi, Muklas alias Ali Gufron, dan Imam Samudra alias Abdul Aziz.

"Tiga dari delapan tersangka akan kami bawa ke Tenggulun untuk melakukan rekonstruksi. Ketiga tersangka itu adalah Amrozi, Muklas, dan Imam Samudra. Kami akan berangkat ke Tenggulun besok (Minggu ini—**Red**) pukul 07.00," tegas Ketua Tim Investigasi Peledakan Bom Bali Inspektur Jenderal I Made Mangku Pastika sesaat setelah tiba di Markas Kepolisian Daerah (Polda) Jatim, di Surabaya, Sabtu kemarin.

(SIE/To6/INU/To3)

Hari /Tanggal /Bulan/ Tahun : SABTU / 29 / MARET / 2003
Hlm/Kolom : 11 / A-7
Sumber : Kompas / ~~Pikiran Rakyat~~ /
Penulis :
No_Klass/Subjek : PIPA BOCOR - PERANG/364 . 1



ASSOCIATED PRESS/JOHN MOORE

Pipa Bocor — *Kapten Angkatan Darat Amerika Serikat Todd Smith melompat menghindari minyak diesel yang tumpah dari pipa di dekat Karbala, Jumat (28/3). Menurut pejabat militer AS, pipa itu bocor akibat terkena tembakan ketika pesawat-pesawat tempur AS coba menembak sebuah kendaraan Irak hari Kamis.*

Hari /Tanggal /Bulan/ Tahun : JUM'AT / 14 / MARET / 2003
Hlm/Kolom : 13 / 1-2
Sumber : Kompas / ~~Pikiran Rakyat~~ /
Penulis : BOY
No_Klass/Subjek : PERANG / 369.1

Perang Irak Bisa Dongkrak

Harga Minyak 50 Dollar AS

JAKARTA, KOMPAS — Harga minyak dunia yang saat ini mencapai 37 dollar AS per barrel diperkirakan akan meningkat lagi menjadi 50 dollar AS jika Amerika Serikat (AS) benar-benar menyerang Irak. Bahkan, dari analisis yang sangat ekstrem diperhitungkan harga minyak dunia akan mencapai 70 dollar AS seperti perkiraan yang dilontarkan oleh Menteri Perminyaka.. Irak beberapa waktu lalu.

Demikian diutarakan pengamat perminyakan Kurtubi saat ditanya mengenai perkembangan harga minyak dunia bila terjadi perang Irak, Kamis (13/3). Menurut Kurtubi, analisis itu berdasarkan banyaknya ladang minyak yang terhenti berproduksi akibat terganggunya perang.

Perang menyebabkan dunia akan kehilangan pasokan minyak mentah sebanyak tujuh juta barrel per hari sehingga pasokan tinggal 70 juta barrel per hari. Padahal, kebutuhan mencapai 77 juta barrel per hari. pada saat berlangsung perang Irak. Pengurangan ini cukup signifikan untuk mempengaruhi harga minyak melonjak menjadi 50 dollar AS.

Kekurangan pasok itu berasal dari ladang minyak di Irak serta ladang minyak di wilayah Kuwait dan Arab Saudi yang berdekatan dengan Irak.

Seperti diketahui, dalam perdagangan minyak, Kamis (13/3), harga minyak jenis *Brent North Sea* bertahan pada harga sekitar 33,72 dollar AS. Adapun minyak mentah jenis *light sweet* untuk kontrak bulan April mencapai 37,83 dollar AS.

Menurut Kurtubi, masalah suplai hanya salah satu dari penyebab melonjaknya harga minyak dunia pada saat ini. Pemicu lainnya adalah faktor psikologis terhadap ancaman perang sebagai dampak nonfundamental.

Ketika ditanya berapa lama pengaruh perang terhadap harga minyak, Kurtubi mengatakan, tergantung eskalasinya. Harga minyak bisa normal kembali ke tingkat harga yang wajar setelah perang berakhir dan produksi normal kembali.

Kurtubi mengatakan, harga minyak mentah dunia tidak akan turun di bawah 25 dollar AS. Dengan demikian, patokan harga keranjang OPEC yang dipatok 22 dollar AS-28 dollar AS seharusnya diganti menjadi 25 dollar AS hingga 31 dollar AS.

Namun, bagi Kurtubi, keputusan Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak (OPEC) untuk tidak menambah produksi merupakan kebijakan yang sudah tepat. Pasalnya kebijakan itu menjaga harga minyak dunia tidak anjlok pasca perang.

Harga BBM

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Purnomo Yusgiantoro seusai mengikuti sidang OPEC ke-124 di Wina, Austria, mengatakan, keputusan OPEC untuk mempertahankan tingkat produksi akan berdampak positif bagi Indonesia. kebijakan itu mendukung tercapainya kestabilan harga bahan bakar minyak (BBM) dalam negeri.

"Dengan keputusan yang diambil Konferensi OPEC kali ini, kuota produksi minyak Indonesia tetap pada angka 1,27 juta barrel per hari. Hal itu benar-benar berdampak positif bagi Indonesia," ujar Purnomo.

Purnomo juga mengatakan, OPEC mempertimbangkan, pada kuartal kedua tahun 2003 permintaan minyak dunia akan mulai menurun. Dengan demikian OPEC merasa tak perlu menambah pasokan, kecuali mempersiapkan langkah antisipasi menghadapi perang.

Pascaperang, diperkirakan permintaan minyak dunia akan menurun. OPEC justru harus melakukan penyesuaian tingkat produksi agar tidak terjadi kelebihan pasokan yang dapat menekan harga minyak.

"Apa yang telah diputuskan oleh OPEC merupakan wujud komitmen untuk menjaga kestabilan pasar minyak dunia. Penambahan produksi hanya akan dilakukan jika memang telah terjadi peristiwa yang luar biasa," ujar Purnomo.

OPEC juga mengharapkan dukungan dari negara produsen minyak non-OPEC untuk bersama-sama menjaga stabilitas pasar minyak internasional, termasuk Angola, Mesir, Meksiko, Oman, dan Rusia.

(BOY/AFP/ANTARA)

Perpustakaan Unikom